

1. KAWIN (ISLAMIC LAW)
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
2. DIVORCE (ISLAMIC LAW)

K/K
Pid 01/02
Pul
t

SKRIPSI

SUKAINAP PULHEHE

**TINJAUAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983
MENURUT HUKUM ISLAM
(PERKAWINAN-PERCERAIAN)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

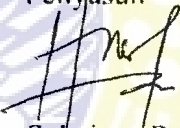
**TINJAUAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 MENURUT HUKUM ISLAM
(PERKAWINAN – PERCERAIAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pembimbing

Liliek Kamilah, SH. M. Hum
NIP. 130. 531 799

Penyusun

Sukainap Pulhehe
03 99 44 969

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2001



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dalam skripsi ini adalah :

1. Terdapat perbedaan kedudukan anak angkat dalam hal waris menurut Hukum Barat (BW), Hukum Adat dan Hukum Islam. Karena BW tidak ada aturan mengenai anak angkat, maka pengaturan mengenai anak angkat dituangkan dalam Stb.1917 No.129 yang memiliki akibat hukum terhadap anak angkat yaitu anak angkat adalah ahli waris orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam hal waris menurut hukum adat, berbeda-beda antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya yang dikarenakan oleh perbedaan sistem kekeluargaan, sistem kewarisan dan sistem perkawinan pada masing-masing masyarakat adat. Sedangkan menurut Al-Qur'an dan Hadist Rosullullah, kedudukan anak angkat, bukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya, namun ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya dan kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui perantara wasiat atau wasiat wajibah.
2. Besarnya wasiat dan wasiat wajibah untuk anak angkat tidak boleh lebih dari atau sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan besarnya wasiat dan wasiat wajibah yang proporsional untuk anak angkat seharusnya tidak boleh melebihi bagian harta warisan yang diterima

oleh anak kandung agar tercipta suatu keadilan. Mengenai prosedur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dilakukan melalui suatu putusan Pengadilan Agama.

Berpijak dari kesimpulan yang didapatkan selama penyusunan skripsi ini, dapat diajukan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Sebaiknya dalam Kompilasi Hukum Islam dituangkan pula berapa batas minimum besarnya wasiat wajibah untuk anak angkat atau setidaknya dibuat suatu petunjuk pelaksanaan untuk para praktisi hukum, khususnya dalam lingkungan Pengadilan Agama maupun dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama, mengenai besarnya wasiat wajibah untuk anak angkat yang proporsional atau sesuai. Sehingga tidak terjadi perbedaan penentuan besarnya wasiat wajibah untuk anak angkat.
2. Sebaiknya segala sesuatu mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat, baik mengenai prosedur maupun besarnya wasiat wajibah yang proporsional untuk anak angkat, lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat benar-benar mengetahui segala sesuatu mengenai wasiat wajibah tersebut.

BAB IV

PENUTUP



Kesimpulan.

1. Dalam penerapan PP No 10 tahun 1983 syarat-syarat poligami lebih diperberat. Mengenai ketentuan tersebut, menurut hukum Islam yang perlu dicermati adalah mengenai syarat-syaratnya :
 - Izin dari pejabat
 - Izin dari isteri
 - Pegawai negeri sipil wanita dilarang untuk menjadi isteri kedua, ketiga, keempat bagi pegawai negeri sipil pria.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan UU perkawinan sehingga sudah selayaknya dicabut.

2. Tata cara perkawinan dan perceraian menurut PP No 10 tahun 1983 dan menurut Hukum Islam dapat dilaksanakan secara bersama selama penerapan PP No 10 tahun 1983 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan UU perkawinan sebagai aturan dasarnya.

Saran

Keberadaan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS sampai saat ini masih mengundang kontroversi dikalangan masyarakat, sedangkan Peraturan yang merubahnya juga belum menyentuh persoalan hak asasi bagi PNS terutama PNS wanita. Penekanan pada pendisiplinan terhadap PNS tidak seharusnya mengabaikan hak seseorang untuk menikah ataupun bercerai menurut tuntunan agamanya masing-masing.

Oleh karena perkawinan dan perceraian adalah masalah hukum perdata dan bersifat pribadi, sebaiknya aturan yang ada dalam PP Nomor 10 tahun 1983 ini tidaklah harus mengikat dan bersifat *lex superior*. Lebih baik diserahkan kepada pengadilan yang bertanggung jawab serta memberikan perlindungan bagi pasangan PNS itu sendiri.

